

**KEKERASAN TERHADAP PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI
YORDANIA 2012-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

REZY AIMAL HAKIKI

18323001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEKERASAN TERHADAP PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI
YORDANIA 2012-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

REZY AIMAL HAKIKI

18323001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKERASAN TERHADAP PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI
YORDANIA 2012-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Tanda Tangan

Karina

Gustri

Willi

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

24 Agustus 2023



Rezy Aimal Hakiki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	16
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	17
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	17
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH	20
2.1. Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama	21
2.2. Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi	28
BAB III KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG TERHADAP PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH	34
3.1. Kekerasan Struktural Terhadap Pengungsi Perempuan Suriah	38
3.1.1. <i>Survival Needs</i> dalam Kekerasan Struktural	38
3.1.2. <i>Well-being Needs</i> dalam kekerasan Struktural	40
3.1.3. <i>Freedom Needs</i> dalam kekerasan Struktural	42
3.2. Kekerasan Langsung Terhadap Pengungsi Perempuan Suriah	44
3.2.1. <i>Well-being Needs</i> dalam Kekerasan Langsung	45
3.2.2. <i>Freedom Needs</i> dalam kekerasan Langsung	47
BAB IV PENUTUP	50
2.1. Kesimpulan	50
2.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6. : <i>A Typology of Violence</i>	13
Tabel 2.1. : <i>The Chosen and The Unchosen</i>	22
Tabel 3.0. : <i>A Typology of Violence</i>	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6. : <i>Galtung's Violent Triangle Model</i>	10
Gambar 4.0. : <i>Galtung's Violent Triangle Model</i>	50

ABSTRAK

Fenomena kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi perempuan Suriah merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Yordania. Implementasi agama dan ideologi patriarki menjadi awal mula terjadi kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung pada pengungsi perempuan Suriah di Yordania. Di mana ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan menurut Johan Galtung dalam teori *Triangle of Violence*. Dalam menganalisis kekerasan kultural pada pengungsi perempuan Suriah di Yordania, penulis menggunakan aspek agama dan ideologi yang kemudian berkembang menjadi kekerasan struktural sehingga melukai kebutuhan dasar pengungsi perempuan seperti kebutuhan atas hidup, kebutuhan atas kesejahteraan, dan kebutuhan atas kebebasan. Peraturan-peraturan dan budaya yang lebih mementingkan laki-laki di Yordania menyebabkan pengungsi perempuan merasakan kekerasan langsung baik secara fisik maupun mental karena tidak adanya kesempatan mereka untuk merasakan kesejahteraan dan hilangnya kebebasan untuk menentukan pilihan hidup mereka. Hasil dari penelitian ini adalah kekerasan kultural, struktural, dan kekerasan langsung terjadi pada pengungsi perempuan Suriah di Yordania.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Suriah, Yordania, Segitiga kekerasan

ABSTRACT

The phenomenon of gender-based violence against women refugee is one part of the human rights violations that occur in Jordan. Religion implementation and patriarchy ideology is the reason of cultural violence, structural violence, and direct violence happen towards Syrian women refugee in Jordan. According to Johan Galtung in his theory of Triangle of Violence those three violence is inseparable. To analysis cultural violence that happen towards women refugee, author using religion and ideology aspect, wich then develop into structural violence and that eventually injure the women refugee basic needs like survival needs, well-being needs, and freedom needs. Culture and regulations that prioritize man more than women in Jordan make women refugee feel direct violence either mentally or physically because there is no regulations that provide their needs and they also losing their rights to decide what they want. The result from this research is that cultural violence, structural violence, and direct violence is happen towards Syrian women refugee in Jordan.

Keyword: Gender Based Violence, Syria, Jordan, Triangle of Violence

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender atau *Gender-Based Violence* adalah istilah yang digunakan untuk mempertegas definisi dari kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, seperti yang tertera pada *Resolution 48/104 Containing the Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 20 December 1993*. Definisi dari konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki ataupun perempuan. Isu *gender equality* merupakan salah satu isu global yang berkembang pada awal abad 20 dan menjadi perhatian dunia hingga saat ini. Fenomena ketidaksetaraan gender masih sangat banyak terjadi di dunia, salah satu bentuk dari fenomena ketidaksetaraan gender yaitu masih terjadinya tindak kekerasan seksual hingga diskriminasi terhadap perempuan, tidak terkecuali yang terjadi pada para pengungsi perempuan Suriah (Zain, 2012).

Suriah yang memiliki nama lengkap Republik Arab Suriah (*Syrian Arab Republic Al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah al-Sūriyyah* / الجمهورية العربية السورية) adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat Asia tepatnya pada wilayah *levant* di Timur Tengah. Konflik di Suriah dimulai ketika masyarakat mulai frustrasi dengan mengakarnya korupsi di Suriah ditambah dengan bencana kekeringan ekstrim yang melanda kawasan di Timur Tengah. Pada 26 Januari 2011, Hasan Ali Akleh

melakukan pembakaran diri sebagai tanda protes terhadap Presiden Assad yang dianggap tidak bertindak terhadap bencana kekeringan yang melanda Suriah dan diperparah dengan kejadian yang terjadi pada 6 Maret 2011 di mana timbul perlawanan di kota Deraa karena para orang tua di sana tidak terima anak mereka ditangkap oleh polisi karena membuat grafiti dengan tulisan (Rakyat ingin menumbangkan rezim) *As- Shaab Yoreed Eskaat el Nizam* (Herlambang, 2018, 83).

Data dari *Syrian Centre for Policy Research* (SPCR) menyatakan bahwa selama konflik terjadi yang menjadi korban tewas adalah sebesar 470.000 orang, sedangkan lebih dari 600.000 orang lainnya terluka dan cacat. Data terakhir dari *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang diambil pada 7 November 2016, sebanyak 8,7 juta telah menjadi pengungsi di dalam negeri dan 4,83 juta tersebar di negara-negara lain, seperti Turki, Jordan, Lebanon, dan Eropa. Tercatat sekitar 1.36 juta warga Suriah yang bermigrasi ke Yordania, sedangkan UNHCR mengatakan terdapat 660,892 warga Suriah yang mengungsi ke Yordania. Tidak ada data yang pasti berapa banyak pengungsi Suriah yang bermigrasi ke Yordania karena masalah pemalsuan dokumentasi dan penyelundupan (UNHCR, 2016, 23; Zaki Mehchy, Rabie Nasser, 2015, 7).

Yordania atau Kerajaan Hasyimiyah Yordania (المملكة الأردنية الهاشمية / *Al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah*) adalah salah satu kerajaan yang berada di kawasan Timur Tengah yang beribukota di kota Amman dan berbatasan langsung dengan Iraq di bagian Timur Laut dan Suriah di utara dan Arab Saudi di bagian timur. Pada tahun 2012 pemerintah Yordania memberlakukan *open-door policy* untuk warga Suriah yang ingin mengungsi, tetapi pada 2014 peraturan

tersebut dirubah menjadi lebih ketat karena pengungsi Suriah yang sudah terlalu banyak (Acu, 2023, 1103).

Yordania memiliki beberapa kamp pengungsian seperti kamp Mrajeeb al-Fhood, Azraq, King Abdullah Park, dan kamp yang terpadat kedua di dunia yaitu kamp Za'atari. Dari data yang di keluarkan UNHCR pada tahun 2019 terdapat lebih dari 50% pengungsi yang berada di Yordania adalah perempuan dan sekitar 20% merupakan anak-anak. Beberapa data menyebutkan sebanyak 80,5% pengungsi Suriah tinggal di daerah perkotaan di Yordania sedangkan hanya sebanyak 19,5% yang tinggal di kamp pengungsian (Acu, 2023, 1103; Al-Hourani et al., 2019, 25).

Pada tahun 2017 pemerintah Yordania memulangkan sekitar 400 pengungsi Suriah perbulan dari bulan Januari hingga bulan Mey tanpa memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dunia Internasional. Hal ini bermuara pada serangan bersenjata yang terjadi di distrik Rukban timur pada bulan Juni 2016 yang menewaskan sekitar tujuh orang dan serangan pada bulan Desember tahun 2016 di selatan kota Kara yang menewaskan sebanyak 19 orang (Human Rights Watch, 2017).

Menurut Amnesty International, seluruh pengungsi perempuan dari Suriah yang melakukan perjalanan meninggalkan Suriah merasa sangat terancam dan sangat tidak aman, karena hampir seluruh negara yang mereka lalui, mereka mengalami pelecehan secara fisik dan eksploitasi secara finansial, hingga dirab-raba atau dipaksa untuk berhubungan seks oleh para penyelundup, petugas keamanan maupun pengungsi laki-laki lainnya. Tirana Hassan, *Amnesty International's Crisis Response director* mengatakan bahwa “*After living through*

the horrors of the war in Iraq and Syria these women have risked everything to find safety for themselves and their children. But from the moment they begin this journey they are again exposed to violence and exploitation, with little support or protection” (Amnesty International, 2016).

Kekerasan secara fisik, seksual maupun finansial dilakukan oleh para penyelundup bahkan otoritas di kamp pengungsian, mereka biasanya menargetkan para pengungsi perempuan yang mengungsi sendirian atau telah kehilangan keluarganya, karena mereka sangat rentan akan masalah finansial dan biasanya para penyelundup ini menawarkan potongan harga dan tempat dengan seks sebagai bahan pertukarannya. Hala, 23 tahun pengungsi perempuan yang berasal dari Aleppo mengatakan “ *At the hotel in Turkey, one of the men working with the smuggler, a Syrian man, said if I sleep with him, I will not pay or pay less. Of course I said no, it was disgusting. The same happened in Jordan to all of us*”. Maryam, 16 tahun salah satu pengungsi dari Suriah mengatakan bahwa “*People started screaming and shouting, so the police attacked us and was hitting everyone with sticks. They hit me on my arm with a stick. They even hit younger kids. They hit everyone even on the head. I got dizzy and I fell, people were stepping on me. I was crying and was separated from my mother. They called my name and I was with my mother. I showed them my arm and a police officer saw my arm and laughed, I asked for a doctor, they asked me and my mother to leave.*” (Amnesty International, 2016).

Dari pemaparan di atas, *gender equality* masih sangat rendah untuk para pengungsi Suriah yang berada di kamp pengungsian. Kekerasan berbasis gender

bisa terjadi ruang privat maupun di ruang publik, bentuknya bisa kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan secara seksual. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isu kekerasan yang berbasis gender yang terjadi pada para pengungsi perempuan Suriah yang berada di Yordania pada tahun 2012 hingga tahun 2022 karena terdapat banyak laporan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap pengungsi perempuan di Yordania.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis di atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kekerasan yang dialami oleh para pengungsi perempuan Suriah di Yordania?

1.3 Tujuan Penelitian

Kekerasan berbasis gender yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah ini sudah terjadi bahkan sebelum mereka berada di Yordania, mereka telah menjadi korban kekerasan berbasis gender sejak mereka masih berada di Suriah. Perempuan Suriah menjadi target oleh pasukan keamanan Suriah pada saat konflik terjadi, tercatat selama konflik terjadi sebagian besar penjara di Suriah berisikan perempuan dan pada saat mereka dipenjara, mereka mengalami kekerasan fisik seperti memar, infeksi kulit dan mata bahkan mereka mengalami kekerasan secara seksual seperti pelecehan hingga pemerkosaan (Holmes Oliver, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah yang berada di kamp

pengungsian di negara Yordania baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian dengan topik isu kekerasan berbasis gender merupakan kajian yang cukup banyak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis isu kekerasan yang berbasis gender yang terjadi pada para pengungsi perempuan Suriah yang berada di Yordania. Dengan mengambil momen di mana dibukanya kamp pengungsian di Yordania pada tahun 2012 menjadikan Yordania sebagai salah satu negara dengan pengungsi Suriah terbesar di dunia, tercatat sebanyak 300.000 pengungsi berada di Yordania, dan sebanyak 160.000 pengungsi berada di kamp pengungsian Za'atari dan sisanya tersebar di beberapa daerah di Yordania, seperti Mereejb Al Fuhod, AlAzraq, dll. Hal tersebut membuat Yordania menjadi negara dengan pengungsi Suriah terbesar dalam satu kamp pengungsian. Selain itu, data yang dikeluarkan oleh *Demographic and Health Surveys Jordan* pada tahun 2019, kekerasan yang terjadi pada perempuan di Yordania lebih dari 15% di setiap kota, hanya dua kota yang memiliki persentase kekerasan dibawah 15% yaitu kota Aljoun dan Karak. Kajian ini akan menganalisis isu kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada pengungsi perempuan Suriah di Yordania (Al-Hourani et al., 2019, 28; Demographic and Health Surveys, 2019, 262).

Batasan penelitian yaitu tahun 2022, karena hingga pada tahun 2022 belum ada tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Yordania untuk menangani permasalahan kekerasan berbasis gender yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada seseorang yang didasari oleh seks atau gender yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, maupun mental yang berakibat hilangnya kebebasan seseorang. Kekerasan berbasis gender mencakup segala perbuatan yang menimbulkan dampak negatif maupun perbuatan tersebut secara terbuka maupun tertutup. Melalui tinjauan pustaka, tulisan ini akan membahas kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah yang berada di kamp pengungsian di negara Yordania menggunakan beberapa literatur dan karya ilmiah yang membahas permasalahan serupa.

Dalam tulisan Mohammed Abdel Karim Al-Hourani, dkk, (2019) yang berjudul “*Sexual Harassment of Syrian Female Youth in Jordanian Refugee Camps*” memaparkan tentang kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada pengungsi perempuan Suriah di kamp pengungsian. Al-Hourani, dkk, berpendapat bahwa lingkungan di kamp pengungsian memiliki peran yang sangat penting dalam terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi perempuan, hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas di dalam kamp pengungsian dan otoritas melepaskan tanggung jawabnya untuk membuat lingkungan yang aman bagi pengungsi perempuan. Selain tidak adanya tanggung jawab dari otoritas Yordania untuk memberikan keamanan bagi pengungsi perempuan, norma dan budaya yang dipercayai oleh perempuan Timur Tengah hanya memperburuk situasi karena mereka merasa bahwa pelecehan merupakan sesuatu yang akan merusak reputasi

keluarganya sehingga mereka hanya diam dan tidak memberitahukan kepada siapaun (Al-Hourani et al., 2019, 30-36).

Senada dengan Mohammed Abdel Karim Al-Hourani, dkk, (2019), tulisan Mirwais Amiri, dkk, (2020) yang berjudul “*An overview of the sexual and reproductive health status and service delivery among Syrian refugees in Jordan, nine years since the crisis: a systematic literature review*”, yang membahas terkait kesehatan seksual dan organ reproduksi pengungsi Suriah serta penanganan yang diberikan oleh pemerintah Yordania, dalam tulisannya Mirwais Amiri, dkk, berargumen bahwa di Yordania terdapat sebanyak 3,1% pengungsi perempuan Suriah mengalami kekerasan seksual non-pasangan dan sebanyak 64,4% korban kekerasan seksual tidak mencari perawatan medis, hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang diberikan kepada pengungsi perempuan terkait kekerasan seksual dan bagaimana penanganan pasca kekerasan seksual terjadi. Rendahnya pengelolaan dan ketersediaan sumber daya medis untuk kamp pengungsian membuat meningkatnya aborsi yang dilakukan sendiri (Amiri et al., 2020, 15-17).

Adapun tulisan dari Marianne Hattar-Pollara (2019) yang berjudul “*Barriers to Education of Syrian Refugee Girls in Jordan: Gender- Based Threats and Challenges*” berisikan tentang budaya dan norma sosial yang menjadi penghambat pengungsi perempuan Suriah untuk mendapatkan edukasi. Dalam tulisannya, Marianne memaparkan bahwa budaya Suriah masih melekat bahkan setelah mereka berada di kamp pengungsian, yang di mana budaya tersebut mengharuskan perempuan untuk melayani, mengorbankan diri, memenuhi segala kebutuhan keluarganya, dan mereka harus tunduk pada tradisi agama dan budaya

mereka. Pengungsi perempuan Suriah tidak memiliki hak untuk menentukan keputusan, mereka bergantung kepada keputusan yang diambil oleh laki-laki yang berasal dari keluarganya, baik itu kakak, adik, maupun suaminya karena sebagian besar dari pengungsi perempuan Suriah yang berada di Yordania telah menikah di bawah umur, para pengungsi perempuan ini dianggap sebagai jenis kelamin yang sangat lemah dan rentan, mereka tidak diberikan kepercayaan bahkan mereka diawasi dengan sangat ketat untuk melindungi kehormatan keluarganya (Hattar-Pollara, 2019, 5-7).

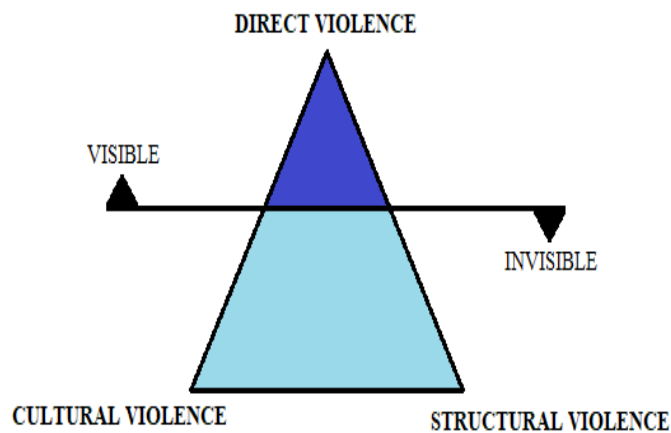
Beberapa literatur di atas menjelaskan bagaimana kekerasan berbasis gender yang terjadi terhadap perempuan. Beberapa peneliti juga telah menulis dan menganalisa artikel mengenai kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada pengungsi perempuan Suriah. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kekerasan berbasis gender dapat terjadi kepada pengungsi perempuan Suriah yang berada di kamp pengungsian di Yordania. Berdasarkan pada literatur-literatur di atas yang telah membahas terkait dengan mengapa terjadi kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi perempuan. Maka dari itu, sangat berguna beberapa literatur di atas bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Triangle of Violence Model by J. Galtung

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan konsep *Triangle of Violence Model* yang diperkenalkan oleh J. Galtung sebagai landasan teori. Johan Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai

ancaman atau penyerangan terhadap kebutuhan dasar manusia secara fisik maupun psikis, yang di mana kebutuhan dasar tersebut merupakan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas seseorang (Galtung, 1969, 167-168). Galtung mengembangkan pandangannya tentang kekerasan berdasarkan karyanya pada tahun 1969, dengan membagi kekerasan menjadi tiga jenis kekerasan yaitu *direct violence*, *structural violence*, *cultural violence* seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 1.6**.



Gambar 1.6. *Galtung's Violent Triangle Model*

Source: Galtung (1990, 295)

Pandangan Galtung terhadap kekerasan menjadi dasar dari pandangannya tentang konsep perdamaian, khususnya hubungan yang ia bentuk antara *direct violence*, *structural violence*, dan *cultural violence* menjadikan hal tersebut sangat penting dalam konsep perdamaian.

a. Cultural Violence

Cultural Violence terjadi karena adanya norma-norma sosial yang berlaku yang membuat kekerasan langsung dan struktural terlihat seperti “benar” dan dapat diwajarkan (Galtung, 1990, 291-292). Menurut Galtung, dalam kekerasan kultural terdapat 7 aspek yaitu, **Religion** yaitu komunitas atau kelompok tertentu dalam masyarakat merasa lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas lain, mereka merasa mereka adalah pilihan Tuhan sedangkan komunitas lain adalah pilihan Setan. Kedua **Ideology** yang di mana dalam variabel ini konsep pilihan Tuhan dan pilihan Setan masih digunakan, tetapi dalam variabel ini Tuhan digambarkan sebagai negara, sehingga mereka menyebut siapapun yang tidak berasal dari suatu negara merupakan *The Others* yang di mana mereka tidak memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari negara tersebut. Selanjutnya **Language**, bahasa dapat menyebabkan kekerasan secara implisit karena bahasa lebih menyerang kepada mental seseorang. Keempat **Art** di dalam beberapa seni terdapat sejarah yang menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi suatu kelompok untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Kelima **Empirical Science**, variabel ini berisikan bahwa sebuah negara yang memiliki sumber daya tetapi tidak memiliki tenaga kerja dan teknologi yang memadai akan selalu bergantung kepada negara-negara yang memiliki kedua hal tersebut, sehingga status negara tersebut akan selalu rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki teknologi memadai. Keenam **Formal Science**, suatu peristiwa dilihat menggunakan teori-teori matematik dan hanya memiliki dua kesimpulan yaitu *valid* dan *invalid*, sehingga memungkinkan terjadi kekerasan karena variabel ini hanya melihat menggunakan *valid* dan *invalid* untuk

menentukan kesimpulan. Ketujuh *Cosmology*, aspek kosmologi membedakan manusia dengan alam, yang di mana alam dianggap sebagai faktor yang menyebabkan perpecahan di antara manusia (Galtung, 1990, 296-301).

b. Structural Violence

Kekerasan struktural merupakan ketidakadilan yang terjadi secara sistematis yang menyebabkan seseorang atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (Galtung, 1969, 168-169). Pengungsi perempuan Suriah tidak mendapatkan toilet tersendiri, mereka diharuskan menggunakan toilet umum yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk tidak membersihkan diri saat mereka mengalami menstruasi. Korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perawatan khusus dan kurangnya ketersediaan pembalut untuk pengungsi perempuan.

c. Direct Violence

Perilaku atau kekerasan yang mengancam atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dilakukan secara langsung dan dapat menciptakan luka yang dapat terlihat dengan mata seperti penindasan, penyerangan seksual, memanipulasi emosi, hingga pembunuhan (Galtung, 1969, 169). Pengungsi perempuan Suriah merasakan kekerasan seksual dan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pengungsi laki-laki, masyarakat sekitar kamp pengungsian, bahkan otoritas yang bertanggung jawab di kamp pengungsian juga melakukan kekerasan terhadap pengungsi perempuan Suriah.

Galtung menjelaskan bahwa terdapat empat kelas kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan untuk menganalisis kekerasan secara langsung dan kekerasan struktural, yang pertama yaitu *survival needs* (negation: death, mortality); *well-being needs* (negation: misery, morbidity); *identity, meaning needs* (negation: alienation); and, *freedom needs* (negation: repression).

Table 1.6 A Typology of Violence

	<i>Survival Needs</i>	<i>Well-being Needs</i>	<i>Identity Needs</i>	<i>Freedom Needs</i>
<i>Direct Violence</i>	<i>Killing</i>	<i>Maiming</i> <i>Siege, Sanctions</i> <i>Misery</i>	<i>Desocialization</i> <i>Resocialization</i> <i>Secondary Citizen</i>	<i>Repression</i> <i>Detention</i> <i>Expulsion</i>
<i>Structural Violence</i>	<i>Exploitation A</i>	<i>Exploitation B</i>	<i>Penetration</i> <i>Segmentation</i>	<i>Marginalization</i> <i>Fragmentation</i>

Sumber: (Galtung, 1990, 292)

Melihat tabel *Typology of Violence* yang di gambarkan di atas, Johan Galtung membagi kebutuhan dasar manusia menjadi empat kelas yaitu *survival needs*, *well-being needs*, *identity, meaning needs*, *freedom needs*. Dari keempat kelas di atas, Galtung membedakan antara kekerasan langsung dengan kekerasan struktural, untuk kekerasan langsung bagian *survival needs* yaitu *killing* (pembunuhan), yang kedua *well-being needs* yaitu *maiming* (menyebabkan luka secara fisik), *siege/sanctions* (blokade/sanksi), *misery* (penderitaan disebabkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok sekunder), selanjutnya *identity needs* yaitu *desocialization* (pengisolasian budaya), *resocialization* (pemaksaan untuk

mengganti budayanya dengan budaya tertentu), *secondary citizen* (pemaksaan menggunakan budaya kelompok dominan setidaknya di ruang publik), dan yang terakhir untuk kekerasan langsung yaitu *freedom needs* yang berisikan *repression* (pembatasan akses), *detention* (penahanan seseorang dalam suatu tempat), dan *expulsion* (pembatasan atas kebebasan untuk berpergian jauh atau keluar negeri) (Galtung, 1990, 293).

Sedangkan dalam kekerasan struktural *survival needs* yaitu *exploitation A* (ketidakadilan antara kelompok dominan dengan kelompok sekunder), bagian *well-being needs* yaitu *exploitation B* (penderitaan yang tidak diinginkan karena peraturan), selanjutnya *identity needs*, dalam bagian ini terdapat *penetration* (memasukan kelompok dominan kedalam kelompok sekunder untuk mengubah cara pandang kelompok sekunder) dan *segmentation* (pengelompokan berdasarkan kesamaan yang dimiliki), yang terakhir *freedom needs* yang terdiri dari *marginalization* (memojokkan sekelompok orang tertentu dengan tidak membiarkan mereka memiliki identitas sendiri), dan *fragmentation* (memecah belah kelompok sekunder) (Galtung, 1990, 294).

Berdasarkan penjelasan konsep *Triangle of Violence Model* yang telah dipaparkan, penulis menganalisis bahwa kekerasan berbasis gender terjadi terhadap pengungsi perempuan Suriah telah memenuhi indikator yang dijelaskan oleh konsep *Triangle of Violence Model* yang di mana pengungsi perempuan Suriah telah merasakan kekerasan berbasis gender.

1.7 Argumen Sementara

Kekerasan berbasis gender yang terjadi pada para pengungsi perempuan Suriah yang berada di kamp pengungsian di Yordania 2012-2022 ditinjau melalui *Triangle of Violence Model* oleh Johan Galtung yang di mana *Cultural Violence* meliputi aspek agama yang di mana pengungsi perempuan menjadi korban dari implementasi agama yang menganggap bahwa pengungsi perempuan bukan merupakan pilihan tuhan, mereka tidak istimewa sehingga hak-hak mereka dibatas, selanjutnya aspek ideologi, Suriah dan Yordania memiliki ideologi yang serupa yaitu patriarki sehingga pengungsi perempuan merasakan diskriminasi dua kali lipat.

Kedua, Structural Violence, terdapat tiga kebutuhan dasar pengungsi perempuan yang tercederai oleh pemerintah Yordania, yaitu *survival needs*, ketidakadilan pemerintah Yordania terhadap perempuan berdampak langsung kepada pengungsi perempuan karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, *well-being needs*, kebijakan deportasi pengungsi yang terindikasi positif HIV membuat ketakutan di para pengungsi, terlebih lagi pengungsi perempuan karena mereka yang menjadi target kekerasan seksual menyebabkan mereka tidak memeriksakan diri setelah mendapatkan pelecehan seksual. Terakhir *freedom needs*, tidak adanya toilet khusus, persediaan kebutuhan khusus pengungsi perempuan menyebabkan pengungsi perempuan berfikir bahwa mereka terpinggirkan.

Ketiga, *Direct Violence* atau kekerasan langsung yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah meliputi *well-being needs*, pemaksaan menikah di

usia dini pada pengungsi perempuan Suriah ditambah dengan kondisi perekonomian menyebabkan tingginya tingkat gangguan mental diantara para pengungsi yang pada akhirnya penganiayaan dalam rumah tangga sangat sering terjadi. Selajutnya *freedom needs*, pembatasan akses pendidikan yang dilakukan keluarga pengungsi perempuan dan *framing* yang dilakukan media-media di Yordania telah merenggut hak kebebasan pengungsi perempuan Suriah di Yordania.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif di mana jenis penelitian ini merupakan salah satu yang sangat dominan digunakan dalam melakukan riset pada studi Hubungan Internasional. Kemudian, penelitian kualitatif ini menjelaskannya lebih cenderung bersifat deskriptif atau kata-kata. Melalui metode penelitian jenis kualitatif ini yaitu guna memperluas wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan isu permasalahan dan mengembangkan sejumlah ide-ide pemikiran yang dituangkan dalam tulisan. Penelitian ini memudahkan peneliti dalam menganalisis kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada pengungsi perempuan Suriah yang berada di kamp pengungsian di Yordania. Karena hasil penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif, maka metode penelitian kualitatif sangat relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam riset ini yaitu pengungsi perempuan Suriah yang berada di kamp pengungsian di Yordania. Sedangkan objek penelitiannya yaitu kekerasan berbasis gender yang terjadi terhadap para pengungsi perempuan di kamp pengungsian.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pra riset sebagai langkah awal untuk memulai pengumpulan data. Pra riset ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian yang diteliti.

Riset ini mengambil data-data yang berasal dari sumber sekunder. Sumber sekunder yang dipilih yaitu berasal dari media tertulis seperti, buku teks akademik, majalah berkala dan surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder berdasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit serta hubungannya dengan topik riset.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah mengumpulkan data, langkah penting selanjutnya yaitu menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkahnya adalah :

a. Menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dari semua sumber sekunder.

- b. Membaca seluruh data yang dimiliki

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data yang didapatkan perlu dibaca secara menyeluruh. Selama proses ini dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan bacaan dengan cepat dan teliti. Tujuan dari proses membaca ini adalah memilih materi yang berkaitan dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait topik riset.

- c. Mengaitkan tema/deskripsi

Proses ini merupakan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk Menemukan korelasi antara tema dan kategori.

- d. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam riset ini adalah untuk menafsirkan makna data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan wawancara dan dokumen terkait.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini akan terdiri beberapa bab, antara lain; **BAB 1** memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian serta sistematika pembahasan. **BAB II** berfokus membahas terkait kekerasan berbasis gender yang disebabkan oleh budaya yang berkembang di masyarakat. **BAB III**

berisi kekerasan yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah baik secara langsung maupun struktural dan analisis kekerasan berbasis gender menggunakan *Triangle of Violence Model* dari Johan Galtung. **BAB IV** merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PENGUNSI PEREMPUAN SURIAH

Bab ini akan menjelaskan terkait kekerasan kultural yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah, terutama bagaimana kekerasan secara tidak langsung yang disebabkan oleh budaya yang berkembang di kamp pengungsian.

Cultural Violence atau kekerasan kultural terjadi karena adanya norma-norma sosial yang berlaku yang membuat kekerasan langsung dan struktural terlihat seperti “benar” dan dapat diwajarkan. Peran dari kekerasan kultural digambarkan sebagai garis waktu dan kekerasan langsung dibayangkan sebagai sebuah *incident*, dan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural sebagai *practice*, kekerasan kultural akan selalu ada dan sangat tahan terhadap perubahan. Kekerasan kultural dianggap sebagai sumber utama dari terjadinya kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Menurut Galtung kekerasan terjadi didasari oleh budaya kemudian menjadi struktural sehingga terjadi kekerasan fisik (Galtung, 1990, 294)..

Johan Galtung telah mengembangkan tujuh variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa kekerasan dapat terjadi berdasarkan budaya dan norma yang berlaku pada suatu daerah ataupun komunitas yang di mana ke tujuh variabel tersebut yaitu, *Religion* dan *Ideology*, *Language* dan *Art*, *Empirical* dan *Formal Science*, dan *Cosmology* (Galtung, 1990, 296).

Untuk menjelaskan kekerasan kultural yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah, penulis hanya menggunakan dua variabel yang dijelaskan oleh

Galtung yaitu, variabel *Religion*, dan *Ideology*, penulis tidak menggunakan variabel *Language* karena Yordania dan Suriah memiliki bahasa yang tidak jauh berbeda dan tidak ada bahasa atau sebutan khusus untuk pengungsi perempuan Suriah sehingga sangat jarang terjadi deskriminasi yang di sebabkan oleh bahasa, dan juga tidak menggunakan variabel *Art* karena dalam kasus kekerasan yang terjadi kepada pengungsi perempuan Suriah tidak didasari oleh seni ataupun karya yang memiliki sejarah tertentu, penulis juga tidak menggunakan *Empirical Science* karena sebagian besar pengungsi laki-laki masih bisa mendapatkan pekerjaan di Yordania sehingga tidak memenuhi variabel ini, dan juga tidak menggunakan *Formal Science* karena kekerasan yang dirasakan oleh pengungsi perempuan tidak dapat dijelaskan dengan *valid* dan *invalid*. Variabel *Cosmology* juga tidak digunakan karena kekerasan yang terjadi tidak berhubungan dengan alam sehingga beberapa variabel tersebut tidak memiliki korelasi yang sesuai untuk menjelaskan mengapa kekerasan terjadi pada pengungsi perempuan Suriah.

Dalam bab ini, penulis membagi pembahasan ke dalam dua bagian. Pertama, penulis akan membahas kekerasan kultural yang di mana kekerasan yang terjadi pada pengungsi perempuan disebabkan oleh aspek *Religion*. Kedua, menjelaskan kekerasan kultural berdasarkan aspek *Ideology*.

2.1. Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama

Johan Galtung menjelaskan bahwa variabel Agama berisikan tentang bagaimana Agama digunakan sebagai pembeda suatu komunitas dengan komunitas lain, dengan kata lain, mereka menginterpretasikan bahwa mereka adalah pilihan Tuhan dan komunitas atau golongan lain merupakan pilihan dari Setan sehingga

mereka merasa memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan komunitas atau golongan lain (Galtung, 1990, 297).

Tabel 2.1. *The Chosen and The Unchosen*

<i>God Chooses</i>	<i>And Leaves to Satan</i>	<i>Consequences</i>
<i>Human Species</i>	<i>Animals, Plants, Nature</i>	<i>Speciesism, Ecocide</i>
<i>Men</i>	<i>Women</i>	<i>Sexism, Witch-Burning</i>
<i>His People</i>	<i>The Others</i>	<i>Nationalism, Imperialism</i>
<i>Whites</i>	<i>Colored</i>	<i>Racism, Colonialism</i>
<i>Upper Classes</i>	<i>Lower Classes</i>	<i>Classism, Exploitation</i>
<i>True Believers</i>	<i>Heretics, Pagans</i>	<i>Meritism, Inquisition</i>

Sumber: (Galtung, 1990, 297)

Berdasarkan tabel di atas, Galtung menjelaskan bahwa urutan 1 hingga urutan 3 sudah ada sejak awal peradaban manusia, dan untuk urutan 4 dan 5 berkembang akibat tindak perbudakan, dan untuk bagian yang terakhir, berkembang sejak adanya perjanjian baru.

Pilihan Tuhan atau *The chosen* dianggap sebagai penyelamat dan lebih dekat dengan surga sedangkan *The Unchosen* merupakan golongan yang dikutuk dan akan berakhir di neraka, sehingga *The Unchosen* harus bergantung pada *The chosen* agar mendapatkan keselamatan, konsep “surga dan neraka” yang dijelaskan tidak hanya berbentuk pada “surga dan neraka” setelah kematian tetapi juga

menggambarkan kesengsaraan dan kesejahteraan di kehidupan sehari-hari (Galtung, 1990, 297).

Agama dan budaya sangat berkaitan satu sama lain karena budaya dapat membentuk perilaku masyarakat dalam menjalani agama yang dianut oleh suatu masyarakat dan agama juga berpengaruh dalam terbentuknya budaya di suatu masyarakat, setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda walaupun terdapat beberapa negara yang memiliki budaya yang serupa. Mayoritas masyarakat Suriah dan Yordania memeluk agama Islam sehingga budaya yang berkembang di masyarakat Suriah dan Yordania memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya, tetapi beberapa nilai-nilai Islam yang di implementasikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Islam, mereka hanya membenarkan perilaku menyimpang menggunakan agama, hal tersebut tidak mencerminkan bahwa Islam menunjukkan ajaran yang salah, tetapi masyarakat Suriah dan Yordania yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara tidak sesuai (Barkah et al., 2023, 7).

Salah satu contoh implemetasi nilai-nilai Islam yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat Suriah dan Yordania yaitu orang tua menikahkan anaknya ketika mereka mencapai masa *aqil baligh* (laki-laki: *ihtilam*, perempuan: *menstruating*). Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang umur seseorang yang telah siap untuk menikah, sehingga hal ini menjadi permasalahan karena seratus tahun yang lalu seorang wanita mengalami menstruasi pertamanya pada usia sekitar 17 tahun, tetapi pada saat ini usia rata-rata seorang wanita periode pertamanya adalah 12 tahun (Hidayati & Halimah Assa'diah, 2020, 30; Rees, 2017, 6).

Pernikahan anak di bawah umur di kalangan pengungsi Suriah terjadi karena para remaja perempuan telah di persiapkan untuk menikah oleh keluarganya ketika mereka masih berumur 10 tahun dengan alasan untuk menjauhkan perempuan dari sesuatu yang حَرَام, (harām) karena melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai informasi secara bebas, selain itu perempuan juga dianggap lebih rentan mendapatkan rumor dan gosip yang hanya akan merusak reputasi keluarganya, selain itu, pernikahan juga dilihat sebagai cara untuk melindungi dan menjaga perempuan dari berbagai kenakalan remaja, hal ini diperkuat oleh salah satu pengungsi Suriah yang mengatakan: *“Our society always blames girls ... Boys, no one talks about them, even if they are the ones who are doing something wrong. [They say] it’s normal, he’s reckless, he’ll learn later. A girl, whether she goes out or not, they’ll shame her, even if she’s not guilty of anything, the blame will be on her”* (Al Akash & Chalmiers, 2021, 8-9).

Fenomena budaya pernikahan anak di bawah umur merupakan hal biasa yang terjadi di Suriah, tercatat sebanyak 50-60% pernikahan anak di bawah umur sebelum pecahnya perang di Suriah, kemudian meningkat secara pesat pada saat mereka berada di kamp pengungsian Yordania sebesar 15%, menjadi 75% hal ini terjadi karena peraturan di Yordania tentang batasan usia perempuan yang dibolehkan untuk menikah adalah 15 tahun yang merupakan usia paling muda di antara negara-negara Muslim lain di dunia. Sebagai contoh Aljazair, Irak, dan Somalia yang menerapkan usia 18 tahun minimal untuk perempuan melakukan pernikahan (Hidayati & Halimah Assa’diah, 2020, 28; Ritchie, 2017, 25)

Penetapan batasan usia di negara-negara muslim ini tidak mencerminkan bahwa segala pernikahan berpacu kepada peraturan tersebut, karena pada dasarnya Syariat Islam baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak memberikan pernyataan yang konkrit tentang usia, sehingga budaya pernikahan anak di bawah umur tetap berlanjut yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan pernikahan di bawah umur sebagai alat untuk menjalankan prostitusi di kamp pengungsian di Yordania. (Hidayati & Halimah Assa'diah, 2020, 29).

Prostitusi anak di bawah umur di kamp pengungsian di Yordania menggunakan pernikahan *misyar* atau *misyar marriage* yang di mana pernikahan ini memungkinkan pihak laki-laki untuk melakukan hubungan seksual yang 'sah' walaupun pasangannya merupakan seorang anak kecil, dalam pernikahan ini suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap istrinya dan istri tidak memiliki hak apapun atas suaminya, pernikahan ini dapat berlangsung dari satu jam, sehari-hari, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun (Hilleary, 2011).

Prostitusi di kamp pengungsian Yordania dijalankan dengan menggunakan pernikahan sebagai alat utamanya, seperti yang dialami oleh Kazal pengungsi Suriah yang berumur 18, dirinya dinikahi oleh pria Arab Saudi yang berumur sekitar 50 tahun, ia memberikan uang sekitar US \$3,100 (UK £2,000) kepada keluarga Kazal agar ia dapat menikahi Kazal. Hal ini dibenarkan oleh Um Mazed, ia adalah seorang pengungsi Suriah berusia 28 tahun yang berasal dari Homs mengatakan bahwa: "*The men are usually between 50 and 80, and they ask for girls*

who have white skin and blue or green eyes. They want them very young, no older than 16.” (McLeod, 2013).

Mohammad Abu Zureiq, 50, seorang petugas kebersihan kamp dari Daraa, mengatakan beberapa wanita di kamp tersebut dijual secara langsung: “*My neighbour sold his daughter for \$2,000 to a Saudi man his age,*”. Selain Abu, seorang perempuan yang berumur 18 tahun juga menceritakan kisah yang serupa yang di mana ayahnya menikahnya seharga \$1.000 dengan seorang pria Yordania berusia 22 tahun yang sering mengunjungi kamp tersebut, kemudian sang suami menyerahkannya ke rumah bordil di Irbid, di mana dia termasuk di antara 20 wanita yang dijual oleh seorang pria yang menyebut dirinya *Faroun* (AP, 2013).

Selain budaya pernikahan di bawah umur, budaya yang berkembang di masyarakat Yordania dan Suriah selama bertahun-tahun tentang peran gender masih sangat kaku dan tradisional, hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap posisi perempuan dalam Islam. Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan tetapi laki-laki ditempatkan satu tingkat lebih tinggi dari perempuan. Hal tersebut bukan untuk merendahkan perempuan, melainkan suatu bentuk penugasan kepada laki-laki atau suami untuk mengurus istri dan anak-anak mereka sehubungan dengan tanggung jawab yang besar yang dimiliki suami untuk istri dan anak-anak mereka, tetap hal tersebut disalahartikan dengan menganggap bahwa status perempuan lebih rendah serta tidak memiliki hak dan hanya akan bergantung pada laki-laki (Iftikhar Cikalkinanty et al., 2021, 90; Patoari, 2019, 1213-1214).

Rendahnya status perempuan dalam budaya yang berkembang di masyarakat Suriah dan Yordania tidak hanya berakar dari kesalahpahaman dari nilai-nilai Islam, budaya tersebut juga dipengaruhi oleh budaya yang berkembang sebelum datangnya Islam di timur tengah, yang di mana perempuan dipandang tidak lebih dari boneka yang tak bernyawa dan hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu laki-laki. Budaya tersebut terus berlanjut hingga saat ini yang di mana seorang suami diharuskan untuk menunjang finansial keluarganya dan perempuan hanya berfokus pada reproduksi sehingga perempuan hanya dapat bergantung kepada laki-laki. Studi yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2018, menemukan bahwa di Yordania laki-laki masih berperan sebagai pembuat keputusan akhir yang di mana sebagian besar perempuan hanya sebagai pihak sekunder. (Essaid et al., 2019, 21; Iftikhar Cikalkinanty et al., 2021, 90).

Budaya ini tetap berlanjut bahkan pada saat pengungsi Suriah berada di kamp pengungsian, perempuan tetap diharuskan untuk melayani, mengorbankan dirinya demi keluarga, mereka juga diharuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa melakukan pertentangan, selain itu perempuan juga harus tunduk pada segala kehendak laki-laki dalam keluarganya, baik tua ataupun muda, mereka juga dibatasi dalam berpakaian, berperilaku demi menjaga kehormatan keluarganya (Hattar-Pollara, 2019, 6).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa perempuan masih dianggap sebagai jenis kelamin yang sangat lemah dan rentan, mereka tidak diberikan kepercayaan dan dituntut untuk tidak merusak kehormatan keluarganya, hal ini berakibat banyaknya korban pemerkosaan yang tidak mencari pertolongan medis yang

menyebabkan tingginya infeksi pada organ mereka, beberapa korban menyatakan bahwa mereka tidak mencari pertolongan medis karena mereka akan diasingkan dan tidak diakui oleh keluarganya karena telah merusak kehormatan keluarganya (Amiri et al., 2020, 15; Hattar-Pollara, 2019,6).

Beberapa hal di atas membuktikan bahwa variabel Agama yang dijelaskan oleh Galtung telah sesuai, yang di mana Galtung menjelaskan bahwa suatu kelompok menginterpretasikan bahwa mereka adalah pilihan Tuhan dan komunitas atau golongan lain merupakan pilihan dari Setan, hal ini dapat terlihat pada (**Tabel 2.1**) yang di mana laki-laki sebagai pilihan Tuhan sedangkan perempuan merupakan pilihan Setan, hal ini terjadi karena adanya penyimpangan interpretasi nilai-nilai Islam dalam budaya yang berkembang di pengungsi Suriah dan masyarakat Yordania sehingga pengungsi perempuan semakin terdiskriminasi karena laki-laki merasa berhak untuk menentukan masa depan perempuan dengan memaksa perempuan untuk menikah di usia dini sehingga mengundang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan agama sebagai alat agar dapat memuaskan dirinya. Jika kesalahpahaman interpretasi nilai-nilai Islam dalam budaya ini tetap berlanjut akan berdampak pada hilangnya hak pengungsi perempuan dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi karena terbatasnya ruang gerak yang diberikan laki-laki untuk perempuan karena perempuan harus tunduk pada segala keputusan yang dibuat oleh laki-laki (Galtung, 1990, 297).

2.2. Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi

Dalam aspek ideologi, Galtung menjelaskan bahwa aspek ideologi tidak jauh berbeda dengan aspek Agama, yang di mana konsep *The Chosen* dan *The Unchosen* digunakan sebagai gagasan politik sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berpengaruh terhadap *The Chosen* dan *The Unchosen*, yang pada akhirnya *The Chosen* akan menganggap bahwa *The Unchosen* bukan bagian yang penting bagi komunitas mereka, hal tersebut yang menjadi akar dari terjadinya kekerasan secara langsung. Menurut Galtung, dalam variabel ini, *The Chosen* dan *The Unchosen* tidak lagi menggunakan istilah “Tuhan” dan “Setan” tetapi esensi dari *The Chosen* dan *The Unchosen* tetap digunakan dengan mengganti istilah pilihan Tuhan dengan *Them Self* dan pilihan Setan sebagai *Other*. *The Chosen* dalam aspek ideologi merasa golongannya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan *The Unchosen*, sehingga mereka merendahkan bahkan mengeksploitasi *The Unchosen* dan jika hal ini terjadi secara terus menerus akan membuat hilangnya rasa kemanusiaan sehingga akan sangat rentan terjadi kekerasan langsung (Galtung, 1990, 298).

Ideologi dianggap sebagai “*thinking system*”, “*belief system*”, dan “*symbolic practices*” yang berkaitan dengan tindakan seseorang di dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun ideologi berusaha untuk terlihat netral, tetapi dalam praktiknya mereka tetap mengidentifikasi “*goods*” dan “*bads*” di kehidupan sosial, sehingga ideologi seringkali dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan seseorang baik di kehidupan sosial maupun di perpolitikan. Ideologi patriarki merupakan sebuah struktur sosial yang melegitimasi

laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan perempuan dan laki-laki lebih berhak mendapatkan hak istimewa. Ideologi ini menegaskan bahwa laki-laki selalu memiliki peran maskulin dan perempuan memiliki peran rendah seperti melahirkan dan mengasuh anak. Ideologi berkembang secara terus-menerus bahkan diadopsi di berbagai budaya sehingga membuat perempuan mempercayai bahwa mereka lebih lemah dibandingkan laki-laki (Salviana & Darvina, 2014, 490-491).

Patriarki sebagai ideologi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu patriarki *Institutional* dan *Individual*, yang di mana *Individual* bersifat lebih privat dan berskala lebih kecil seperti di rumah tangga sedangkan patriarki *Institutional* bersifat publik. Patriarki *Individual* terlihat lebih eksplisit karena laki-laki jauh lebih mungkin untuk memiliki kontrol langsung atas perempuan dan anak-anak menggunakan kekuatan fisik dan ancaman kekerasan di dalam rumah tangga. Sedangkan patriarki *Institutional* terjadi secara implisit dalam hal pembuatan peraturan dan perekonomian seperti perbedaan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan hingga perbedaan upah yang diberikan kepada laki-laki dengan perempuan (McKee, 2014, 40-44).

Masyarakat Yordania masih mempertahankan tradisi kesukuan yang membuat segala aspek kehidupan baik ekonomi, hubungan sosial, hingga aktifitas politik dikendalikan oleh tradisi kesukuan. Struktur sosial yang didasari oleh kesukuan bersifat vertikal atau patriarki, hal tersebut mempengaruhi peran gender baik di ranah privat maupun di ranah publik. Untuk di ranah privat peran perempuan sangat terbatas dan tidak memiliki wewenang atas apapun di dalam keluarganya, dan untuk di ranah publik, struktur sosial kesukuan memperkecil kesempatan

perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan perekonomian (Pettygrove et al., 2006, 15-16).

Suku di Yordania merupakan faktor utama yang menentukan seseorang dapat berpartisipasi di perpolitikan sehingga jika seseorang ingin berpartisipasi di dalam politik maka dia harus mendapatkan dukungan dari sukunya, hal ini memperkecil kesempatan perempuan berpartisipasi karena perempuan dianggap tidak dapat menentukan keputusan secara rasional, perempuan bertindak berdasarkan emosi sedangkan laki-laki dianggap bertindak dan berpikir menggunakan pikiran mereka bukan emosi, fenomena ini dapat terlihat pada pemilihan parlemen tahun 1989 kandidat perempuan hanya sebanyak 13 orang, 3 pada tahun 1993, meningkat menjadi 17 pada tahun 1997, dan 43 pada pemilihan tahun 2003 dan dari banyaknya kandidat perempuan di Yordania hanya terpilih 1 orang pada tahun 1993, sedangkan 6 lainnya terpilih pada tahun 2003 karena adanya perubahan peraturan di Yordania yang di mana perempuan memiliki kuota 6 kursi (Alsoudi, 2006, 181; Pettygrove et al., 2006, 20-23).

Perempuan yang berada di masyarakat kesukuan dan patriarkal seperti di Yordania dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi standar-standar yang berlaku di masyarakat, sehingga perempuan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengambil peran di berbagai aspek kehidupan, hal tersebut membuat semakin tingginya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang pada akhirnya akan membuat perempuan semakin terdiskriminasi karena tidak adanya perwakilan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di masyarakat tersebut (Pettygrove et al., 2006, 20-21).

Tingginya kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan di Yordania berdampak pada pengungsi perempuan Suriah karena tumbuhnya persepsi bahwa izin kerja hanya diperuntukan untuk laki-laki dan perempuan hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan izin bekerja di Yordania. Selain sulitnya mendapatkan izin bekerja, pengungsi perempuan juga sangat rawan terhadap tindak pelecehan di tempat kerja karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang keselamatan pekerja perempuan di Yordania hal ini disebabkan oleh sikap masyarakat Yordania yang merasa bahwa pekerjaan formal hanya untuk laki-laki dan perempuan hanya bekerja di bidang-bidang informal seperti pertanian, produksi rumahan, dan lain-lain, hal ini diperparah dengan adanya kepercayaan di kalangan masyarakat Yordania dan Suriah bahwa sangat memalukan jika seorang istri bekerja di luar rumah (Amjad et al., 2017, 51-54).

Ideologi patriarki berkembang dan bertahan di Yordania karena masyarakat Yordania masih mempertahankan tradisi kesukuan yang di mana di dalam tradisi kesukuan perempuan merupakan pihak sekunder, sedangkan laki-laki merupakan seseorang yang berkuasa sehingga segala sesuatu harus ditentukan oleh laki-laki, hal tersebut terus berkembang yang menyebabkan munculnya persepsi bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki yang menghasilkan adanya pembatasan akses pekerjaan untuk perempuan di Yordania. Adanya pembatasan akses kepada perempuan di Yordania berdampak sangat signifikan terhadap pengungsi perempuan Suriah yang berada di Yordania mulai dari sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, rendahnya keamanan untuk pengungsi perempuan Suriah yang bekerja yang menyebabkan pengungsi perempuan Suriah

sangat rentan mendapatkan pelecehan di tempat kerja (Amjad et al., 2017, 54-55; Pettygrove et al., 2006, 15).

Penjelasan di atas membuktikan bahwa variabel ideologi yang disebutkan oleh Galtung telah sesuai, yang di mana menurut Galtung *Them self* merasa memiliki nilai yang lebih tinggi di bandingkan *Other*. Untuk kasus ini, laki-laki Yordania sebagai *The Chosen* sedangkan pengungsi Suriah adalah *The Other* atau *Unchosen*, walaupun pengungsi laki-laki Suriah termasuk *The Other*, tetapi mereka memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan Yordania dan pengungsi perempuan Suriah. Alhasil pengungsi perempuan Suriah di Yordania mengalami diskriminasi ganda karena mereka perempuan dan seorang pengungsi, hal ini terlihat dari hanya pengungsi laki-laki yang lebih mudah untuk mendapatkan izin bekerja dibandingkan perempuan Yordania terlebih lagi pengungsi perempuan Suriah (Galtung, 1990, 297-298).

BAB III

Kekerasan Struktural dan Langsung Terhadap Pengungsi Perempuan

Suriah

Bab ini akan menjelaskan terkait kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah di Yordania dan bagaimana kekerasan struktural dan kekerasan secara langsung terjadi di kamp pengungsian.

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi secara sistematis yang di mana kekuasaan di kendalikan oleh kelompok atau kelas sosial tertentu sehingga kelompok atau kelas sosial di luar kelompoknya menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kekerasan struktural tidak menyerang seseorang atau kelompok secara langsung, tetapi menyerang dengan peraturan-peraturan yang hanya menguntungkan kelompoknya (Galtung, 1969, 168-170).

Kekerasan langsung atau *direct violence* adalah kekerasan yang terjadi secara langsung kepada fisik yang berakibat hilangnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kekerasan langsung dapat menciptakan luka yang dapat terlihat dengan mata seperti penindasan, penyerangan seksual, memanipulasi emosi, hingga pembunuhan (Galtung, 1969, 169).

Table 3.0 A Typology of Violence

	<i>Survival Needs</i>	<i>Well-being Needs</i>	<i>Identity Needs</i>	<i>Freedom Needs</i>
<i>Direct Violence</i>	<i>Killing</i>	<i>Maiming</i> <i>Siege, Sanctions</i> <i>Misery</i>	<i>Desocialization</i> <i>Resocialization</i> <i>Secondary Citizen</i>	<i>Repression</i> <i>Detention</i> <i>Expulsion</i>
<i>Structural Violence</i>	<i>Exploitation A</i>	<i>Exploitation B</i>	<i>Penetration</i> <i>Segmentation</i>	<i>Marginalization</i> <i>Fragmentation</i>

Sumber: (Galtung, 1990, 292)

Dalam tabel di atas, Johan Galtung membagi kebutuhan dasar manusia menjadi empat kelas, yaitu *survival needs*, *well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs*, yang kemudian terbagi kembali menjadi beberapa bagian, untuk kekerasan langsung *survival needs* berupa *killing* atau pembunuhan, dalam *well-being needs* yaitu *maiming* atau mencederai seseorang secara fisik yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan fisik, selain itu terdapat *siege/sanctions* yang berartikan sanksi, *siege* atau blokade merupakan istilah klasik sedangkan *sanctions* adalah istilah modern yang lebih sering digunakan yang berartikan sanksi, selanjutnya terdapat *misery* atau menyengsarakan individu yang sangat rentan (Galtung, 1990, 293).

Ketiga yaitu *identity needs*, dalam kekerasan langsung, terdapat *desocialization* yang berartikan memisahkan seseorang dengan budayanya, sedangkan *resocialization* pemaksaan untuk menjalani budaya tertentu, dan

secondary citizen yang berarti pemaksaan melaksanakan budaya kelompok dominan setidaknya di ruang publik, kelas terakhir yaitu *freedom needs*, dalam kekerasan langsung terdiri dari *repression* atau pembatasan terhadap akses sosial, politik, dan dikarenakan budaya, *detention* merupakan penahanan individu atau kelompok di satu tempat seperti penjara dan kamp konsentrasi, dan *expulsion* maksudnya membatasi seseorang untuk berpergian keluar negeri (Galtung, 1990, 293).

Selanjutnya kekerasan struktural, untuk kelas *survival needs* terdapat *exploitation A* yang memiliki arti bahwa terjadi ketidaksetaraan antara pihak dominan dengan pihak *underdogs* atau sekunder, sehingga pihak sekunder merasakan kerugian yang dapat menyebabkan kematian seperti kelaparan dan wabah penyakit. Dalam *well-being needs* yaitu *exploitation B* merupakan kesengsaraan yang tidak diinginkan seperti bekas luka yang tidak dapat dihilangkan, malnutrisi dan penyakit, selanjutnya, *identity needs* dalam kekerasan struktural adalah *penetration* yaitu memasukan pihak dominan kedalam kelompok sekunder untuk mempengaruhi dan merubah cara pandang mereka sedangkan *segmentation* merupakan pengelompokan pihak sekunder berdasarkan kesamaan yang mereka miliki, dan yang terakhir terdapat kelas *freedom needs* yang berisikan *marginalization* atau menyudutkan kelompok tertentu dengan tidak membiarkan mereka memiliki identitas sendiri dan *fragmentation* yang berartikan memecahbelah hubungan diantara kelompok kelas bawah (Galtung, 1990, 293-294).

Untuk menjelaskan kekerasan struktural yang terjadi pada pengungsi perempuan Suriah, penulis hanya menggunakan *survival needs*, *well-being needs*, dan *freedom needs*, tetapi untuk kelas ini penulis hanya menggunakan *marginalization* dan tidak menggunakan *fragmentation* karena pemerintah baik masyarakat Yordania tidak memecahbelah pengungsi agar mereka membenci satu sama lain, dan penulis tidak menggunakan *identity needs*, karena pemerintah Yordania tidak melakukan *penetration* kedalam kamp pengungsian atau tidak memiliki seseorang yang berada di dalam kamp pengungsian yang ditugaskan untuk merubah pandangan pengungsi terhadap pemerintah Yordania, selanjutnya pemerintah Yordania juga tidak melakukan *segmentation* atau pengelompokan pengungsi berdasarkan kesamaan yang mereka miliki.

Selanjutnya kekerasan langsung, penulis tidak menggunakan *survival needs* karena sejauh ini tidak adanya pembunuhan kepada pengungsi Suriah, dan *identity needs* karena Yordania dan Suriah memiliki sedikit kemiripan budaya dan tidak adanya pelarangan atau pemaksaan untuk menerapkan budaya Yordania untuk pengungsi Suriah. Penulis hanya menggunakan *well-being needs*, dan *freedom needs* tetapi penulis hanya menggunakan *repression*, dan tidak menggunakan *detention* karena tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa pengungsi perempuan Suriah di masukan kedalam penjara maupun diisolasi di kamp-kamp pengungsian di Yordania, serta tidak menggunakan *expulsion* karena tidak adanya halangan pengungsi Suriah untuk berpergian keluar Yordania.

Dalam bab ini, penulis membagi pembahasan ke dalam dua bagian. Pertama, penulis akan membahas kekerasan struktural yang di mana kekerasan

yang terjadi pada pengungsi perempuan dijelaskan menggunakan kelas *survival needs*, *well-being needs*, dan *freedom needs*. Kedua, menjelaskan kekerasan langsung berdasarkan kelas *well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs*.

3.1. Kekerasan Struktural Terhadap Pengungsi Perempuan Suriah

Johan Galtung melihat kekerasan sebagai sesuatu yang mencederai kebutuhan dasar manusia, dalam kekerasan struktural, kekerasan terjadi secara tidak langsung yang di mana kelompok atau kelas dominan mengendalikan sistem untuk memenuhi kepentingan kelompoknya sehingga membuat kelompok di luar kelompoknya menderita bahkan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (Galtung, 1969, 169).

3.1.1. Survival Needs dalam Kekerasan Struktural

Tulis *Survival needs* dalam kekerasan struktural yaitu *exploitation A* yang berarti ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak dominan kepada pihak sekunder yang mengakibatkan kerugian dan memungkinkan mereka mengalami kematian seperti kelaparan, diasingkan karena penyakit (Galtung, 1990, 293).

Sekitar 80% pengungsi Suriah di Yordania berada di bawah garis kemiskinan dan 55% pengungsi Suriah memiliki utang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan yang tinggi menyebabkan masalah di sektor kesehatan, banyak pengungsi Suriah mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain, hal tersebut terjadi karena tempat tinggal dan sanitasi yang sangat buruk. Pada tahun 2013 pengungsi Suriah diberikan akses gratis ke rumah sakit,

tetapi pada November tahun 2014 akses kesehatan di batalkan dan pengungsi Suriah di haruskan untuk membayar dan pada tahun 2018 peraturan dirubah yang di mana biayanya menjadi dua kali lipat (Karasapan Omer, 2022).

Tingginya biaya kesehatan, sedikitnya persediaan air bersih, pembalut, dan alat kontrasepsi, serta tidak adanya toilet khusus untuk perempuan selain itu, kurangnya petugas keamanan dan pencahayaan ketika malam hari menjadikan pengungsi perempuan Suriah sangat rentan akan pelecehan seksual dan mendapatkan penyakit berbaya seperti HIV. Tidak ada peraturan terkait kekerasan berbasis gender atau perawatan bagi korban kekerasan seksual untuk pengungsi di Yordania tetapi Yordania memiliki peraturan bahwa pengungsi yang terindikasi positif HIV akan di deportasi (Samari, 2017).

Kemiskinan pengungsi Suriah yang tidak terkendali di Yordania salah satunya disebabkan oleh sulitnya mendapatkan perizinan kerja, hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Yordania yang di mana pemberi kerja harus terlibat dalam proses permohonan izin kerja dan jika pengungsi meninggalkan pekerjaanya maka izin kerjanya hilang dan harus membuat permohonan ulang walaupun Kementerian Tenaga Kerja Yordania telah membebaskan biaya permohonan izin kerja untuk pengungsi Suriah pada April 2016 tetapi terdapat banyak hambatan seperti biaya pembuatan kartu identitas, bukti kependudukan, surat keterangan medis, hingga biaya yang diminta oleh petugas secara tidak resmi (Gordon, 2017, 12-13).

Pekerjaan untuk pengungsi Suriah di Yordania dibatasi di sektor formal karena pemerintah Yordania tidak ingin masyarakatnya bersaing dengan pengungsi Suriah sehingga pengungsi Suriah hanya diperbolehkan bekerja di bidang konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Dengan adanya batasan ini, perempuan mendapatkan hambatan tambahan karena ketiga bidang ini di dominasi oleh laki-laki yang menyebabkan mengurangnya kesempatan pengungsi perempuan untuk bekerja di Yordania. Salah satu pengungsi perempuan Suriah Nisa (ibu empat anak berusia 39 tahun) mengatakan ketika di Suriah saya bekerja sebagai seorang guru, ketika saya berada di Yordania saya tidak diperbolehkan untuk bekerja sebagai guru disini (Acu, 2023, 1108).

Melihat *exploitation A* yang merupakan bagian *survival needs* dalam kekerasan struktural yang di gambarkan oleh Johan Galtung dalam **Tabel 3.0**, telah sesuai dengan yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah yang di mana ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Yordania kepada pengungsi Suriah terlebih lagi pada pengungsi perempuan sehingga mengakibatkan kerugian dan memungkinkan mereka mengalami kematian karena tidak adanya fasilitas khusus untuk perempuan dan kecilnya kemungkinan perempuan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka (Galtung, 1990, 293).

3.1.2. *Well-being Needs* dalam Kekerasan Struktural

Pemerintah Yordania mengeluarkan kebijakan bahwa setiap individu yang ingin mencari pekerjaan di sektor publik diwajibkan untuk menjalani tes HIV, dan untuk pendatang atau pengungsi di haruskan untuk menjalani tes HIV untuk

memperpanjang izin tinggal di Yordania. Selain itu, pelayanan kesehatan di Yordania juga diwajibkan untuk melaporkan setiap individu yang terdeteksi positif HIV ke pemerintah, hal tersebut menyebabkan pengungsi perempuan tidak memeriksakan dirinya dari pelecehan seksual yang mereka alami, mereka lebih memilih untuk diam dan menderita dibandingkan dipulangkan ke Suriah (Amiri et al., 2020, 17; Younes, 2020).

Peraturan terkait deportasi kepada seorang yang positif HIV menyebabkan tidak adanya keberanian untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan untuk HIV sehingga pengungsi di Yordania berisiko menderita penyakit yang lebih berbahaya, terlebih lagi pengungsi perempuan, mereka lebih rentan positif HIV karena tingginya kasus pelecehan seksual di kamp pengungsian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti, tidak adanya fasilitas khusus seperti toilet khusus untuk perempuan, keamanan di sekitar toilet, ketersediaan air bersih, dan sedikitnya persediaan keperluan khusus untuk perempuan, selain itu informasi terkait penanganan pasca pelecehan seksual sangat rendah di kamp pengungsian (Amiri et al., 2020, 17; Doshag et al., 2016, 14-15).

Tidak hanya rendahnya sosialisasi informasi pasca pelecehan seksual, sosialisasi juga sangat rendah tentang bagaimana mengurangi penularan HIV dan apa saja yang menjadi sumber penularan HIV di kamp pengungsian menjadi tantangan untuk pengungsi perempuan karena pada saat ini beberapa pengungsi perempuan lebih mempercayai bahwa bank darah adalah sumber utama penularan HIV dibandingkan hubungan seksual (Amiri et al., 2020, 17).

Johan Galtung menjelaskan bahwa terdapat *exploitation B* di *well-being needs* dalam kekerasan struktural yang berarti bahwa kelompok kelas bawah merasakan kesengsaraan yang tidak diinginkan seperti bekas luka yang tidak dapat dihilangkan, malnutrisi dan penyakit kronis. Dalam kasus pengungsi perempuan Suriah di Yordania, mereka merasakan penderitaan dua kali lipat dibandingkan pengungsi laki-laki karena mereka merasakan pelecehan seksual dan tidak dapat melakukan pengobatan dikarenakan ketakutan mereka atas kebijakan pemerintah Yordania terkait pemulangan pengungsi yang positif HIV, selain itu pengungsi perempuan juga tidak mengetahui bagaimana penanganan pasca pelecehan, serta bagaimana menangani penularan HIV karena rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Yordania (Galtung, 1990, 293).

3.1.3. *Freedom Needs* dalam Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural tidak hanya dapat menimbulkan bekas luka di tubuh, juga dapat menyerang pikiran dan jiwa seseorang, dalam kekerasan struktural kelas *freedom needs*, terdapat *marginalization* yang berarti kelompok yang dominan menyudutkan individu tertentu yang terdapat di dalam kelompok sekunder dengan tidak membiarkan mereka memiliki identitas sendiri sehingga mereka merasa terasing dan tidak begitu penting (Galtung, 1990, 293-294).

Pengungsi perempuan sangat rentan akan merasakan marginalisasi dibandingkan dengan pengungsi laki-laki, hal ini terjadi karena secara umum perempuan dilihat sebagai kelompok "minoritas" dan "rentan" yang di mana label tersebut hasil dari budaya yang berkembang menjadi peraturan undang-undang dan

kebijakan suatu negara. Label minoritas untuk perempuan tidak merujuk pada jumlah tetapi diskriminasi yang mereka terima karena statusnya yang tidak memiliki posisi dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang mereka inginkan tidak di pertimbangkan. Rendahnya status sosial perempuan ini menjadi dua kali lipat ketika perempuan menjadi pengungsi karena mereka menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengakses layanan sosial seperti perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, serta akses kesehatan, dan akses untuk mendapatkan bahan sanitasi seperti air bersih, pembalut, dan lain-lain (Pittaway, 2017, 2-3).

Partisipasi perempuan di parlemen Yordania yang sangat rendah menyebabkan tidak adanya fokus untuk memenuhi kebutuhan dan keamanan perempuan di berbagai sektor, seperti kesehatan dan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius terlebih lagi untuk sektor pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhannya perempuan membutuhkan pekerjaan, tetapi jika tidak adanya peraturan khusus untuk pekerja perempuan terkait kesempatan dan keselamatan pekerja dari kekerasan dan pelecehan seksual hanya akan membuat perempuan menjadi semakin sengsara. Tidak adanya peraturan khusus untuk pekerja perempuan di Yordania ini secara langsung berdampak pada pengungsi perempuan karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya, untuk melakukan ini mereka harus melawan stigma sosial terkait perempuan tidak dapat bekerja diluar rumah, selain itu kecilnya kesempatan bekerja untuk perempuan hingga pelecehan yang mereka terima pada saat mereka bekerja (Alsoudi, 2006, 181; Gordon, 2017, 18).

Tidak adanya toilet khusus untuk perempuan di kamp pengungsian merupakan salah satu masalah pengungsi perempuan yang disebabkan oleh marginalisasi pengungsi perempuan. Pengungsi perempuan harus berjalan lebih dari dua kilometer untuk menggunakan toilet umum lain jika toilet di kamp pengungsian sangat penuh, dan ketika mereka tiba, mereka tetap harus mengantri sekitar satu jam untuk mendapatkan giliran menggunakan toilet. Ketika malam hari, pengungsi perempuan memilih untuk tidak menuju toilet karena tidak adanya pencahayaan dan pengaman pada toilet sehingga mereka lebih memilih untuk menahan kebutuhan mereka untuk menggunakan toilet yang berakibat mereka merasakan kesakitan yang luar biasa (Al-Hourani et al., 2019, 26; Doshag et al., 2016).

Galtung menjelaskan bahwa dalam kelas *freedom needs* bagian *marginalization*, kelompok yang dominan menyudutkan individu tertentu yang terdapat di dalam kelompok sekunder dengan tidak membiarkan mereka memiliki identitas sendiri sehingga mereka merasa terasing dan tidak begitu penting, hal ini telah sesuai karena pengungsi perempuan berfikir bahwa mereka tidak penting karena tidak ada perhatian khusus untuk mereka dengan tidak adanya peraturan tentang keamanan dari pelecehan seksual di kamp pengungsian maupun tempat bekerja. serta tidak adanya fasilitas khusus untuk mereka di kamp pengungsian (Galtung, 1990, 293-294).

3.2. Kekerasan Langsung Terhadap Pengungsi Perempuan Suriah

Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang terjadi secara langsung pada fisik seorang individu yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan

seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kekerasan langsung biasanya menciptakan luka yang dapat terlihat dengan mata, salah satu penyebabnya yaitu penindasan, penyerangan seksual, memanipulasi emosi sehingga seseorang terluka, hingga pembunuhan (Galtung, 1969, 169).

3.2.1. *Well-being Needs* dalam Kekerasan Langsung

Dalam kelas *well-being needs* terdapat tiga bagian yaitu *maiming*, *siege/sanctions*, dan *misery*. *Maiming* berarti mencederai individu secara fisik sehingga individu tersebut mengalami luka secara fisik, untuk *siege/sanctions* berarti blokade atau sanksi yang di mana akses seseorang ditutup secara sengaja sehingga mereka tersiksa secara perlahan, dan terakhir terdapat *misery* yang berarti menyengsarakan individu sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Galtung, 1990, 293).

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kekerasan fisik terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender yang berakibat atau akan mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ataupun mental seorang perempuan baik terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi. Norma sosial dan budaya masyarakat Timur Tengah mewajarkan laki-laki untuk melakukan tindakan fisik kepada perempuan untuk mendisiplinkan mereka, hal ini tidak menjadi tindakan kriminal karena dalam masyarakat patriakal kekerasan fisik dibenarkan oleh undang-udangnya. Selain mendisiplinkan perempuan, kekerasan fisik juga dapat dihasilkan dari gangguan jiwa atau depresi ketika laki-laki merasa tidak mampu untuk menjaga keluarganya sehingga kondisi mentalnya terganggu yang berujung pada kekerasan fisik (Al-Shdayfat, 2017, 4).

Pernikahan dini di kamp pengungsian di Yordania yang sangat tinggi dan keadaan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan tingginya gangguan mental diantara pengungsi sehingga meningkatkan resiko pengungsi perempuan menjadi korban kekerasan fisik karena sebagian besar pengungsi perempuan bergantung pada suaminya. Dari data yang ada, pengungsi perempuan yang menikah di bawah umur lebih sering mendapatkan kekerasan fisik dibandingkan pengungsi yang menikah di umur yang lebih tua, dan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi lebih sering mendapatkan kekerasan dibandingkan dengan pengungsi perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, jika pengungsi perempuan tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan menikah di bawah umur maka ia akan sangat menderita baik secara fisik maupun psikologi (Al-Shdayfat, 2017, 4).

Tingginya pernikahan dini di antara pengungsi Suriah tidak terlepas dari hambatan dan halangan yang mereka terima ketika mereka ingin melanjutkan pendidikan, keluarga mereka menganggap bahwa pendidikan untuk perempuan hanya buang-buang waktu, karena tugas perempuan hanya mengurus rumah, suami, dan anak sehingga mereka memaksa anak perempuan mereka untuk segera mungkin menikah. Sebagian besar pengungsi Suriah mementingkan pendidikan hanya untuk laki-laki, karena hanya laki-laki yang dapat menjaga kehormatan keluarga sedangkan perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan hanya akan menghacurkannya (Hattar-Pollara, 2019, 6)

Lingkungan di kamp pengungsian menjadi salah satu penyumbang pelecehan seksual kepada pengungsi perempuan, kamp-kamp pengungsian di Yordania tidak memiliki aturan dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual,

selain itu, tidak adanya pengawasan langsung dari petugas keamanan, dan diperparah dengan tidak adanya kontrol keluarga terhadap laki-laki sehingga laki-laki sangat bebas melakukan tindakan ilegal di kamp pengungsian. Berbagai macam bentuk pelecehan seksual terjadi di kamp pengungsian seperti *catcalling*, pengungsi perempuan di paksa untuk melakukan tindakan seksual, hingga menyentuh pengungsi perempuan sehingga sebagian besar pengungsi perempuan mengalami trauma dan ketakutan yang luar biasa untuk keluar dari tempat tinggal mereka (Al-Hourani et al., 2019, 32-33).

Penjelasan di atas telah sesuai dengan *well-being needs* yang di gambarkan oleh Johan Galtung, yang di mana dalam kelas *well-being needs* dalam kekerasan langsung terdapat tiga bagian yaitu *maiming*, *siege/sanctions*, dan *misery* yang di mana ketiga bagian ini berhubungan satu sama lain, jika melihat kasus pengungsi perempuan Suriah, mereka menerima hambatan dari keluarganya untuk mendapatkan pendidikan dan diminta untuk menikah secepat mungkin sehingga pengungsi perempuan ini menjadi sangat rentan akan kekerasan fisik yang di lakukan oleh suami mereka dikarenakan ketidakstabilan emosi suaminya, selain itu pengungsi perempuan juga mendapatkan pelecehan seksual dari pengungsi laki-laki di kamp pengungsian yang menjadikan pengungsi perempuan semakin sengsara (Galtung, 1990, 293).

3.2.2. *Freedom Needs* dalam Kekerasan Langsung

Interaksi yang kompleks antara budaya patriarki, tradisi, dan implentasi agama menghilangkan kebebasan pengungsi perempuan untuk menentukan apa yang mereka inginkan, sehingga keluarga mereka yang menentukan apa yang

mereka butuhkan tanpa mempertimbangkan apa yang mereka inginkan. Pembatasan untuk menentukan masa depannya membuat pengungsi perempuan menjadi sangat rentan akan kekerasan berbasis gender karena keluarga mereka hanya menginginkan mereka untuk menikah walaupun usia dan kondisi mental mereka belum mencapai kondisi stabil (Hattar-Pollara, 2019, 5-6).

Peran perempuan Suriah tidak berubah walaupun mereka telah berada di kamp pengungsian di Yordania, mereka tetap harus melayani, merawat, hingga mengorbankan diri mereka untuk keluarganya dan mereka harus tunduk kepada semua laki-laki di dalam keluarnya tanpa melihat muda atau tua. Mereka tidak dilibatkan dalam menentukan keputusan bahkan keputusan tersebut untuk dirinya dan mereka hanya harus menaati keputusan tersebut tanpa diperbolehkan untuk menolak (Hattar-Pollara, 2019, 5-6).

Dominasi yang dimiliki keluarga pengungsi perempuan Suriah ini menyebabkan terbatasnya akses pengungsi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, sebagian besar pengungsi perempuan menginginkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tetapi keluarga mereka tidak mengizinkan, justru menginstruksikan mereka untuk belajar untuk menjadi seorang ibu dan istri yang baik sehingga mereka hanya dapat mengikuti keputusan keluarga mereka (Hattar-Pollara, 2019, 6).

Selain itu, pengungsi perempuan kehilangan harga dirinya karena *framing* yang dilakukan beberapa media di Yordania, mereka menyebut pengungsi perempuan sebagai barang dibandingkan sebagai korban, hal ini terlihat dari beberapa judul berita yang terbit di Yordania seperti, “*Marrying Syrians secretly*”,

“Marrying a female refugee for 150 dollars”, “Early marriages spread among Syrian female refugees”, “Provision of Syrian refugees for marriage”, “Female refugees for sex”. “Forcing female refugees to practise prostitution”, “Female refugees for sale”, dan “Syrian female refugees resort to prostitution in Jordan”. Dengan judul-judul di atas, menciptakan stereotip yang buruk bagi pengungsi Suriah (Al-Hourani et al., 2019, 29).

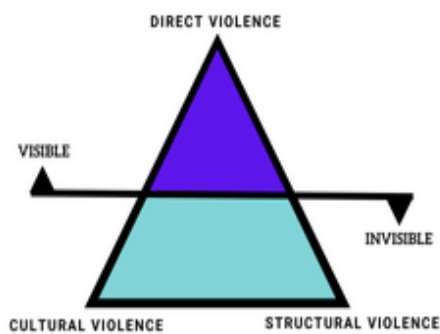
Galtung menjelaskan dalam kelas *freedom needs*, terdapat *repression* yang memiliki arti pembatasan terhadap akses sosial, politik, yang disebabkan oleh budaya dan tradisi, hal ini telah sesuai, yang di mana keluarga pengungsi perempuan Suriah membatasi akses pengungsi perempuan untuk mendapatkan pendidikan selain itu, media-media di Yordania mem-*framing* pengungsi perempuan sehingga akses mereka untuk sosialisasi dengan warga Yordania terbatas karena *framing* media menciptakan stereotip yang buruk untuk pengungsi perempuan. Keluarga pengungsi dan media Yordania telah melakukan *repression* terhadap pengungsi perempuan dengan membatasi akses pengungsi perempuan terhadap pendidikan dan akses kehidupan sosial mereka (Galtung, 1990, 293).

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Suriah pada bulan Maret tahun 2011 menyebabkan migrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat Suriah, salah satu negara yang menjadi tujuan migrasi adalah Yordania. Sekitar 1.36 juta warga Suriah mengungsi menuju Yordania, dan sebagian besar yang melakukan migrasi merupakan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena pengungsi perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak maka mereka sangat rentan akan kekerasan berbasis gender dari berbagai pihak, baik dari pihak Yordania maupun pengungsi laki-laki.



Kekerasan Kultural:

- Aspek Agama : Implementasi agama Islam yang menikahkan perempuan ketika mereka *aqil baligh* tanpa melihat kondisi pada saat ini menjadikan pengungsi perempuan semakin menderita karena pada saat ini perempuan mengalami menstruasi ketika mereka berumur 12 tahun.
- Aspek Ideologi : Negara asal dan negara tuan rumah memiliki ideologi yang serupa yaitu patriarki sehingga pengungsi perempuan merasa semakin menderita karena mereka tetap harus mengalah pada laki-laki walaupun keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat bertahan.

Kekerasan Langsung:

- Well-being needs : Pernikahan di usia dini dan kondisi keadaan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan penganiayaan fisik pada pengungsi perempuan sering terjadi.
- Freedom needs : Pembatasan akses pendidikan dan framing media di Yordania menghilangkan kebebasan pengungsi perempuan.

Kekerasan Struktural:

- Survival Needs : Pembedaan laki-laki dengan perempuan dalam mendapatkan kesempatan kerja di Yordania menyebabkan pengungsi perempuan menderita kemiskinan karena mereka perempuan dan pengungsi.
- Well-being needs : Pendeportasian pengungsi yang terindikasi positif HIV dibandingkan memberikan perawatan membuat pengungsi perempuan semakin menderita karena pengungsi perempuan lebih rentan merasakan pelecehan seksual.
- Freedom needs : Pemerintah Yordania tidak memberikan toilet khusus dan menyediakan kebutuhan khusus perempuan menjadikan pengungsi perempuan merasa terpinggirkan

Gambar 4.0 Galtung's Violent Triangle Model

Source: Galtung (1990, 295)

Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender dapat disebabkan oleh faktor budaya, dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, hingga kekerasan yang terjadi secara langsung seperti yang terlihat pada **Gambar 4.0** di atas. Ketiga faktor ini saling berhubungan, sehingga jika budaya di suatu negara mendiskriminasi perempuan maka peraturan yang dibuat juga akan mendiskriminasi perempuan, yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan langsung atau kekerasan secara fisik.

Yordania dan Suriah memiliki budaya yang serupa, kedua negara ini masih mempertahankan implementasi nilai-nilai agama Islam yang memiliki esensi patriarki tradisional seperti, hanya laki-laki yang dapat bekerja di luar rumah sedangkan perempuan hanya mengurus rumah dan perempuan lebih baik langsung menikah ketika mereka sudah *akil baligh* atau menstruasi. Budaya ini tetap di pertahankan ketika para pengungsi ini berada di kamp pengungsian yang kemudian di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kepuasan diri dengan menjadikan agama sebagai alatnya.

Negara Yordania memiliki ideologi patriarki sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat mendiskriminasi perempuan di berbagai sektor, seperti sulitnya akses perempuan di pekerjaan-pekerjaan formal dan tidak ada peraturan khusus agar perempuan tidak menjadi korban pelecehan seksual. Sehingga, pengungsi perempuan lebih menderita karena mereka merupakan pengungsi dan perempuan.

Pemerintah Yordania tidak begitu memperhatikan kebutuhan khusus untuk pengungsi perempuan, seperti keamanan di kamp pengungsian, toilet khusus untuk

perempuan, persediaan air bersih, dan persediaan kebutuhan khusus perempuan. Selain itu, kebijakan pemulangan pengungsi yang terindikasi positif HIV menjadi masalah serius, yang menyebabkan ketakutan bagi pengungsi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual untuk memeriksakan dirinya ke petugas medis.

Alhasil, pada akhirnya pengungsi perempuan Suriah hanya dapat pasrah dengan keadaan yang terjadi, mereka tidak dapat melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami karena jika mereka memeriksakan diri ke petugas medis, mereka akan di paksa untuk melakukan tes HIV yang memungkinkan mereka dikembalikan ke Suriah, apabila mereka melaporkan pelecehan seksual kepada keluarganya mereka akan di cap sebagai perusak kehormatan keluarga.

Budaya yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah umur dan implemetasi agama terkait penggunaan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan perempuan serta dipadukan dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk di kamp pengungsian menghasilkan kondisi mental yang tidak stabil sehingga kekerasan fisik sangat sering terjadi pada pengungsi perempuan. Selain itu, tidak adanya keamanan di kamp pengungsian menjadikan pengungsi perempuan semakin sengsara karena setiap mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, ancaman akan pelecak seksual semakin tinggi

2.2 Rekomendasi

Setelah apa yang ditulis oleh peneliti dimulai dari bab satu hingga pada bab tiga diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat

umum. Namun peneliti berupaya untuk memberikan sebuah rekomendasi bagi peneliti yang nantinya memiliki sebuah keinginan untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi perempuan Suriah.

Rekomendasi untuk peneliti di masa yang akan datang, dapat untuk meneliti mengenai kekerasan berbasis gender dengan melihat proses yang lebih mendetail. Kemudian rekomendasi selanjutnya yaitu, peneliti kedepannya dapat untuk menjelaskan fenomena ini menggunakan kacamata analisis yang berbeda, sebab sebuah fenomena sosial tidak hanya bisa dijelaskan menggunakan satu kacamata analisis saja, melainkan juga dapat menggunakan beberapa kacamata analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Acu, C. (2023). A double crisis: the gendered impacts of COVID-19 on Syrian refugee women in Jordan. *Third World Quarterly*, 44(6), 1101–1118.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2175657>
- Al Akash, R., & Chalmiers, M. A. (2021). Early marriage among Syrian refugees in Jordan: exploring contested meanings through ethnography. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1080/26410397.2021.2004637>
- Al-Hourani, M. A. K., Azzam, A. B., & Mott, A. J. (2019). Sexual Harassment of Syrian Female Youth in Jordanian Refugee Camps. *International Journal of Child, Youth and Family Studies*, 10(4.1), 24–43.
<https://doi.org/10.18357/ijcyfs104.1201919285>
- Al-Shdayfat, N. (2017). Physical Abuse Among Syrian Refugee Women in Jordan. *Middle East Journal of Nursing*, 11(1), 3–7.
- Alsoudi, A. M. (2006). Women's Participation in the Parliamentary Elections in Jordan 2003: A Socio-Political Study in Greater Amman Area. *Human and Social Sciences*, 33(1), 175–188.
- Amiri, M., El-Mowafi, I. M., Chahien, T., Yousef, H., & Kobeissi, L. H. (2020). An overview of the sexual and reproductive health status and service delivery among Syrian refugees in Jordan, nine years since the crisis: a systematic literature review. In *Reproductive Health* (Vol. 17, Issue 166, pp. 1–20). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12978-020-01005-7>
- Amjad, R., Aslan, J., Borgnäs, E., Chandran, D., Clark, E., Ferreira, A., Jaiwon, P., & Mohajer, O. (2017). *Examining Barriers to Workforce Inclusion of Syrian Refugees in Jordan* (25). www.ilo.org/publns
- Amnesty International. (2016, January 18). Female refugees face physical assault, exploitation and sexual harassment on their journey through Europe. *International, Amnesty*.
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/>
- AP. (2013, March 10). Desperate Syrian women in Jordan turn to prostitution. *Gulf News*. <https://gulfnews.com/world/mena/desperate-syrian-women-in-jordan-turn-to-prostitution-1.1156235>
- Barkah, Q., Chalidi, C., Rochmiyatun, S., Asmorowati, S., & Fernando, H. (2023). The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia. *Samarah*, 7(1), 1–20.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.13316>
- Demographic and Health Surveys. (2019). *Jordan Population and Family Health Survey 2017-18*.
- Doshaq, B., Mumani, N., Gehrlain, S., Nishida, A., & Mashaqbeh, E. (2016). *Inter-Agency Task Force (IATF) WASH Sector Gender Analysis in Za'atari and Azraq Refugee Camp*.
- Essaid, A., Sajdi, J., & Taleb, H. A. (2019). *Gender Discrimination in Jordan*. www.irckhf.org.

- Galtung, J. (1969). VIOLENCE, PEACE, AND PEACE RESEARCH*. In *Source: Journal of Peace Research* (Vol. 6, Issue 3).
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Gordon, G. (2017). *Solving the Refugee Employment Problem in Jordan: A Survey of Syrian Refugees*.
- Hattar-Pollara, M. (2019). Barriers to Education of Syrian Refugee Girls in Jordan: Gender-Based Threats and Challenges. *Journal of Nursing Scholarship*, 51(3), 241–251. <https://doi.org/10.1111/jnu.12480>
- Herlambang, A. (2018). Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1(2), 82–93. <https://doi.org/10.23969/transborders.v1i2.794>
- Hidayati, D., & Halimah Assa'diah, N. (2020). EARLY MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW. *Al-Daulah*, 9(2), 25–37.
- Hilleary, C. (2011, April 11). Exploit or Be Exploited: Survival Sex Among Syria's Refugee Women. *VOA*. <https://www.voanews.com/a/exploit-or-be-exploited--survival-sex-among-syrias-refugee-women/1639651.html>
- Holmes Oliver. (2013, November 12). Syrian women suffer inside their country and out. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-arab-women-syria-idUSBRE9AB00L20131112>
- Human Rights Watch. (2017). *Jordan: Syrian Refugees Being Summarily Deported*. <https://www.hrw.org/news/2017/10/02/jordan-syrian-refugees-being-summarily-deported>
- Iftikhar Cikalkinanty, F., Winda Oktavia, T., & Fakhruddin, A. (2021). Patriarchy Culture in Gender Equality Concept: Islamic Perspective. *Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, 5(1), 81–93. <https://doi.org/10.31538/almada.v5i1.2010>
- Karasapan Omer. (2022, January 27). *Syrian refugees in Jordan: A decade and counting*. BROOKINGS. <https://www.brookings.edu/articles/syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/#:~:text=Around%2080%20percent%20of%20Jordan%27s,families%20are%20in%20extreme%20poverty.>
- Mckee, J. R. (2014). *Patriarchal Ideology and Violence Against Women: A Theoretical Contribution Using Longitudinal, Individual-Level Analyses* [Old Dominion University]. <https://doi.org/10.25777/c1cd-3j98>
- McLeod, B. (2013, May 10). Syrian refugees “sold for marriage” in Jordan. *The World Tonight, BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22473573>
- Patoari, M. H. (2019). The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective. *Beijing Law Review*, 10(05), 1211–1224. <https://doi.org/10.4236/blr.2019.105065>
- Pettygrove, M. W., Nasser, L., & Fauss, L. (2006). *Obstacles to Women's Political Empowerment in Jordan: Family, Islam, and Patriarchal Gender Roles*.
- Pittaway, E. (2017). *THE WORLD'S BIGGEST MINORITY? Refugee Women and Girls in the Global Compact on Refugees* (The Forced Migration Research Network). <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/59e5f4447.pdf>

- Rees, J. A. (2017). Religion and Culture. *E-IR Foundations*, 1–9. <https://www.e-ir.info/2017/01/08/religion-and-culture/>
- Ritchie, H. A. (2017). *Uncertain livelihoods in refugee environments Between risk and tradition for Syrian refugee women in Jordan*. www.securelivelihoods.org.
- Salviana, V., & Darvina, S. (2014). Political Ideology Meaning and Patriarchal Ideology of Female Politicians in Indonesia: A Case in Malang. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 486–495. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.061>
- Samari, G. (2017). Syrian Refugee Women’s Health in Lebanon, Turkey, and Jordan and Recommendations for Improved Practice. *World Medical and Health Policy*, 9(2), 255–274. <https://doi.org/10.1002/wmh3.231>
- UNHCR. (2016). *The Global Report 2016*.
- Younes, R. (2020). *Foreigners Living with HIV in Jordan Face an Impossible Choice*. <https://www.hrw.org/news/2020/10/26/foreigners-living-hiv-jordan-face-impossible-choice#>
- Zain, Z. M. (2012). The Awareness on Gender-based Violence among Students in the Higher Learning Institutions. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 38, 132–140. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.333>
- Zaki Mehchy, Rabie Nasser, K. S. (2015). Developing health centres and hospitals indices for Syria. In *Researchers in the Syrian Centre for Policy Research (SCPR)*.